



Article Informations
Corresponding Email:
rafinuurap12@gmail.com

Received: 11/02/2025; Accepted:
22/02/2025; Published: 30/06/2025

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG PADA MASA SHINZO ABE TERKAIT STATUS QUO KEPULAUAN KURIL DENGAN RUSIA TAHUN 2015-2020

Rafinuur Adhil Purnama

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai sengketa *Northern Island* atau disebut Pulau Kuril antara Jepang dan Rusia. Sengketa ini sudah berlangsung sejak Perang Dunia Kedua yang kepemilikannya beberapa kali berganti dan berpindah yang disebabkan oleh kondisi perang. Sengketa ini kembali menjadi pembicaraan disebabkan oleh fokus politik Jepang yang memprioritaskan kepemilikan beberapa bagian Pulau Kuril untuk kembali menjadi wilayah teritorial Jepang. Untuk mencapai hal tersebut, Jepang menggunakan *San Francisco Peace Treaty* sebagai dasar yang menyatakan bahwa Pulau Kuril hingga saat ini masih perlu ditinjau kepemilikannya, karena disebutkan bahwa Jepang menyerahkan Pulau tersebut kepada Rusia, namun Rusia bukan merupakan bagian dari perjanjian tersebut. Sehingga statusnya masih abu-abu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kepentingannya, Jepang berusaha untuk mempertahankan hegemoni AS sebagai mitranya. Dimana Jepang mendapatkan dukungan melalui ekonomi, politik, keamanan, dan posisi internasional sebagai mitra kuat AS. Kepentingan Shinzo Abe sendiri dalam kasus ini adalah sebagai janji politik dan nilai lebih dalam berpolitik. Usaha tersebut dicapai melalui upaya perbaikan hubungan antara Jepang dan Rusia, yang diimplementasikan melalui berbagai pertemuan diplomasi.

Kata kunci: *status quo*, Sengketa, Kepulauan Kuril

Abstract

This study discusses the Northern Island dispute or the so-called Kuril Island between Japan and Russia. This dispute has been going on since the Second World War whose ownership changed several times and changed due to war conditions. This dispute has become a topic of discussion again due to Japan's political focus on prioritizing the ownership of some parts of the Kuril Island to return to Japan's territory. To achieve this, Japan uses the San Francisco Peace Treaty as a basis stating that the ownership of the Kuril Island still needs to be reviewed, because it is stated that Japan handed over the Island to Russia, but Russia is not part of the agreement. So, the status can be considered as unclear. This research uses qualitative methods with descriptive analysis research type. In the process, this research uses data collection techniques through library research. The results of this study indicate that to achieve its interests, Japan is trying to maintain the hegemony of the US as its partner. Where Japan gets support through the economy, politics, security, and international position as a strong partner of the US. Shinzo Abe's own interest in this case is as a political promise and more value in politics. This effort was achieved through efforts to improve relations between Japan and Russia, which were implemented through various diplomatic meetings.

Keywords: Status Quo, Kurile Island, Dispute

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Jepang dan Uni Soviet (sekarang Rusia) terlibat dalam sebuah sengketa wilayah yang juga secara langsung mempengaruhi hubungan bilateral keduanya hingga saat ini. Sengketa ini meliputi wilayah Kepulauan Kuril yang terdiri dari empat pulau, yakni Pulau Shikotan, Kunashiri, Etorofu (atau Iturup) dan Habomai.¹ Secara historis, awal kemunculan sengketa atas Kepulauan Kuril terjadi pada abad ke-18, tepatnya ketika Perjanjian Shimoda atau disebut juga *The Treaty of Commerce Navigation and Delimitation between Russo-Japanese* disepakati pada tahun 1855, dimana sebelum tahun tersebut, tidak ada kejelasan mengenai batas resmi wilayah diantara kedua negara.

Perjanjian Shimoda menjadi perjanjian pertama yang membatasi wilayah kedua negara. Mengacu pada perjanjian ini, perbatasan Rusia-

¹ Gavrilov, "Challenges and Prospects of the Southern Kuril Islands' Status", *Mediterranean Journal of Social Sciences* Vol. 7, No. 1, 301-306 2016, p. 302.

Jepang di Kepulauan Kuril ditarik antara pulau Iturup dan Urup, yang menghasilkan keputusan bahwa segala sesuatu di utara garis ini diberikan kepada Rusia dan yang berada di garis selatan adalah milik Jepang (yaitu pulau-pulau yang disengketakan: Iturup, Kunashir, Shikotan dan sekelompok pulau Habomai).² Tujuan utama dari perjanjian itu adalah untuk membangun "perdamaian abadi. dan persahabatan yang tulus di antara Rusia dan Jepang". Perjanjian tersebut sekaligus membuka tiga pelabuhan Jepang untuk kapal Rusia, yakni: pelabuhan Shimoda, Hakodate dan Nagasaki, dengan catatan, Rusia berhak memperoleh hak khusus di bidang perdagangan dalam wilayah pelabuhan tersebut³. Menurut Perjanjian Shimoda, Sakhalin tidak seharusnya dibagi antara kedua pihak dan dinyatakan sebagai zona non-militerisasi. Namun, setelah bertahun-tahun, Jepang mencoba mengklaim wilayah tersebut, beserta wilayah Kepulauan Kuril Utara, yang telah dinyatakan milik Rusia sesuai dengan Perjanjian Shimoda. Untuk menghentikan kontradiksi atas ketidakjelasan tersebut, maka pada tahun 1875, dibuatlah Perjanjian *Saint-Petersburg*, dimana atas dasar perjanjian tersebut, Russia menyerahkan kedaulatannya atas bagiannya dalam Kepulauan Kuril untuk ditukarkan dengan wilayah Sakhalin⁴.

Namun kepemilikan Rusia atas Sakhalin tidak berlangsung lama. Akibat perang Rusia-Jepang tahun 1904-1905 dalam memperebutkan wilayah Machuria, membuat Rusia kehilangan bagian selatan Sakhalin kepada Jepang, karena saat itu diduduki oleh pasukan Jepang⁵. Penyerahan atas bagian selatan Sakhalin kemudian menciptakan sebuah perjanjian baru, *Peace Treaty of Portsmouth* yang ditandatangani antara Rusia dan

² Ministry of Foreign Affairs of Japan, "Japanese Territory", Joint Compendium of Documents on the History of Territorial Issue between Japan and Russia, 2001, diakses melalui <https://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/edition92/period1.html> pada 31 Desember 2021.

³ Kaczynski, "The Kuril Islands Dispute Between Russia and Japan: Perspectives of Three Ocean Power", *Russian analytical digest* 20/07, 1-8, 2013, p. 6.

⁴ Treaty for Exchange of Sakhalin for the Kurile Islands, "Article 2 of Joint Compendium of Documents on the History of Territorial", 1875, diakses melalui <http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/edition92/period2.html> pada 1 Januari 2022.

⁵ (Shendrikova, 2012, p. 56)

Jepang pada tanggal 5 September 1905⁶. Perjanjian *Portsmouth* dinilai berhasil membuat perbatasan antara keduanya stabil, sampai pada akhir Perang Dunia II, Rusia mengokupasi seluruh Kepulauan Kuril dan wilayah selatan Sakhalin pada Agustus 1945. Pengambilan wilayah yang dilakukan Rusia ini didasarkan pada *Yalta Summit* 1945, dimana Stalin saat itu mendeklarasikan penyerangan terhadap Jepang tiga bulan setelah perang Jerman. Hal ini membuat seluruh penduduk Kepulauan Kuril terpaksa mengungsi ke wilayah utara Jepang. Tak lama dari kejadian ini, muncul *San Fransisco Peace Treaty* yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan sekutu, yang menyatakan

“Japan renounce all rights, title and claim to the Kuril Islands, and to that portion of Sakhalin and the island adjacent to it over which Japan acquired sovereignty as a consequence of the Treaty of Portsmouth”⁷.

Perjanjian yang memberikan hak wilayah Kepulauan Kuril ke tangan Jepang tersebut secara terang-terangan tidak disetujui oleh Rusia, karena tak ada satupun isi perjanjian yang memberikan Rusia hak atas Kepulauan Kuril. Batalnya Perjanjian San Fransisco menjadi titik kelim hubungan kedua negara, hingga pada tahun 1965 melalui *Soviet-Japanese Joint Declaration*, keduanya sepakat untuk kembali membuka hubungan diplomatiknya, dengan catatan, kepemilikan atas Kepulauan Kuril masih menjadi perdebatan antara keduanya, bahkan hingga saat ini⁸. Hubungan keduanya terkait sengketa wilayah Kepulauan Kuril kembali mencuat ditahun 2006, ketika Rusia memilih untuk menembakan kapal nelayan Jepang yang menyebabkan satu orang nelayan tewas kala itu⁹. Penembakan

⁶ Quillen, “The Kuril Islands or the Northern Territories: Who Owns Them - Islands Territorial Dispute Continues to Hinder Relations between Russia and Japan”, *North Carolina Journal of International Law Vol. 18, No. 3, 633-660*, 1992, p. 634

⁷ McDevitt & Gorenburg, “The Long Littoral Project: Sea of Japan: A maritime Perspective on Indo-Pacific Security”, *CNA Analysis and Solutions, 1-48*. 2013, p. 29.

⁸ Buntilov, “The Kuril Islands/Northern Territories Dispute: A Comparison of local news reportage in Sakhalin and Hokkaido”, *Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies Vol. 17, Issues 3, 17-34*, 2017, p. 18.

⁹ Chan, “Russian Shooting of Japanese Fisherman Heightens Tensions over Kuril Islands”, New York: World Socialist Web Site, 2006, diakses melalui <https://www.wsws.org/en/articles/2006/08/japa-a31.html> pada 1 Januari 2022.

ini dilakukan dengan dalih Rusia yang mengatakan nelayan tersebut telah menerobos batas wilayah teritorial Rusia. Jepang merespon peristiwa ini dengan dorongan Rusia untuk meminta maaf. Namun Rusia malah mengambil langkah kontras, dimana mereka akan melakukan penambahan pasukan militernya di kawasan Kepulauan Kuril, yang berujung pada memanasnya kembali tensi diantara kedua negara tersebut.

Perebutan wilayah Kepulauan Kuril antara Jepang dan Rusia dinilai memiliki implikasi kuat dengan kepentingan dari keduanya. Pasalnya, Kepulauan Kuril sendiri diyakini memiliki potensi melimpah akan kandungan kekayaan laut, juga ditemukannya sumber daya alam yang belum dieksplorasi seperti minyak bumi dan gas alam, serta emas dan perak.¹⁰ Kepulauan Kuril juga mempunyai beragam pegunungan berapi dan memiliki potensi besar dalam aspek pariwisata.¹¹ Secara geografis, bagi Rusia, Kepulauan Kuril merupakan wilayah yang sangat strategis dalam hal pertahanan. Sedangkan bagi Jepang, berdasarkan aturan Zona Ekonomi Eksklusif, Kepulauan Kuril masuk dalam bagian teritorialnya.¹²

Dengan jaraknya yang sangat dekat dengan Rusia, Jepang menilai jika Kepulauan Kuril jatuh ketangan Rusia, tersebut akan menjadi ancaman besar bagi keamanannya. Pasalnya, Rusia juga kini tengah menjalin hubungan kuat dengan China dalam bidang keamanan, yang dimana bagi Jepang, sebagai 'teman dekat' Amerika, merasakan hal tersebut sebuah ancaman bagi keamanannya. Kuatnya kepentingan kedua negara atas Kepulauan Kuril menyebabkan resolusi konflik dalam sengketa ini memiliki kompleksitas yang tinggi, membuat sengketa Kepulauan Kuril antara Jepang dan Rusia menjadi sengketa teritorial terpanjang dalam sejarah kawasan Asia Timur.

¹⁰ Korzhov, "The Kurils: A difficult life on the disputed islands", Kurislink: Aljazeera, 2016, diakses melalui <https://www.aljazeera.com/amp/features/2016/12/15/the-kurils-a-difficult-life-on-the-disputed-islands> pada 1 Januari 2022.

¹¹ Rapry, "Kepentingan Rusia dalam Kerjasama Proyek Sakhalin 1 Dengan Jepang tahun 1996-2003", Skripsi Sarjana Ilmu Sosial Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, p. 5

¹² Kapur, "Russia-Japan Relations: Politico-strategic Importance of the Disputed Southern Kurile Islands/Northern Territories", *India Quarterly: A Journal of International Affairs* vol. 68 Issue 4, 385-405, 2013, p. 388.

Baik Jepang maupun Rusia tidak mau melepaskan, bahkan melonggarkan sedikitpun kepemilikannya terhadap wilayah Kepulauan Kuril. Tarik ulur hubungan diplomatik keduanya, memaksa Jepang dan Rusia untuk melangkah hati-hati sambil menyusun strategi untuk mempertahankan posisinya atas Kepulauan Kuril. Bagi Jepang sendiri, langkah strategis guna mempertahankan Kepulauan Kuril sudah dilakukan jauh beberapa dekade ke belakang, namun hingga saat ini belum juga berhasil¹³. Ditahun 2012, dimana terpilihnya kembali Perdana Menteri Petahana, Shinzo Abe, yang disebut sebagai salah satu Perdana Menteri Jepang yang memiliki reputasi tegas dalam sengketa Kepulauan Kuril, memberikan harapan besar bagi Jepang untuk dapat menyelesaikan sengketa ini segera mungkin. Sejak awal masa kampanyenya, Shinzo Abe selalu mengangkat isu Kepulauan Kuril, sehingga kehadirannya dianggap sebagai salah satu politisi konservatif Jepang yang cukup agresif dalam mempertahankan wilayah Jepang dalam sengketa dengan negara-negara tetangga.

Pada awal tahun 2019, Rusia dan Jepang melakukan diskusi terbaru mengenai status Kepulauan Kuril. Perjanjian 1956 menetapkan bahwa pulau-pulau Habomai dan Shikotan akan dikembalikan ke Jepang, sedangkan masalah Kunashiri dan Etorofu harus diselesaikan selama pembicaraan untuk perjanjian damai.

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Rusia Vladimir Putin telah sepakat untuk mempercepat pembicaraan semacam itu. Namun, beberapa kelompok nasionalis Rusia, terutama di Sakhalin Oblast, wilayah yang mencakup pulau Sakhalin dan Kepulauan Kuril, percaya bahwa indikasi bahwa Rusia bersedia memperdebatkan status pulau Habomai dan Shikotan merupakan pengkhianatan kepada konstitusi.¹⁴ Kedua pulau itu hanya mencakup 7% dari wilayah yang dipersengketakan, tetapi konstitusi Rusia yang baru melarang "pemindahan wilayah Rusia." Di sisi lain, Jepang

¹³ F. Giblin, "National Strategies and Japan's Northern Territories", *Naval War College Review*, Winter 1987, Vol. 40, No. 1, 53-68, 1987, p. 55.

¹⁴ Nikola Mikovic, "Why Russia will not return the Kuril Islands to Japan," *The Interpreter*, diakses melalui <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-russia-will-not-return-kuril-islands-japan> pada 3 Juli 2022.

menegaskan bahwa Federasi Rusia diharuskan untuk dengan cermat menegakkan semua tanggung jawab sebelumnya, termasuk sub-ayat yang tidak terpenuhi tentang masalah teritorial, sebagai penerus hukum Uni Soviet.¹⁵

Kepulauan Kuril sangat penting untuk strategi Rusia karena mereka memberi Angkatan Laut Rusia akses aman ke Samudra Pasifik melalui Laut Okhotsk. Kehadiran militer Rusia juga membantu meningkatkan pengaruhnya dalam politik Asia Timur. Di sisi yang berlawanan dari konflik, penduduk Jepang, khususnya kaum konservatif di Hokkaido, memiliki ikatan emosional yang kuat dengan pulau-pulau tersebut dan Jepang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang melimpah di kawasan itu.¹⁶ Rusia saat itu mengusir semua penduduk Jepang di pulau itu. Kebanggaan nasional dan sejarah adalah faktor dalam ketidaksepakatan. Menurut orang Jepang, ini selalu menjadi negara mereka. Masih ada beberapa orang yang ingin mengklaim hartanya di sana. Orang-orang juga ingin memanfaatkan beberapa lokasi penangkapan ikan dan sumber daya bawah laut yang melimpah.¹⁷

Semasa kepemimpinannya, Shinzo Abe menerapkan strategi diplomasi dalam sengketa ini. Namun hingga akhir masa kepemimpinannya ditahun 2020, sengketa antara Rusia dan Jepang ini belum juga menemukan titik terang. Meski demikian, apa yang sudah dilakukan Jepang semasa pemerintahan Shinzo Abe dalam upaya penyelesaian sengketa Kepulauan Kuril tentu memiliki dampak, baik langsung maupun tidak, baik positif maupun negatif. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai “Kebijakan Luar Negeri Jepang terhadap Rusia dalam Sengketa Kepulauan Kuril tahun 2015-2020”.

Shinzo Abe sendiri, selaku Perdana Menteri Jepang kala itu, memiliki karakteristik yang dikenal agresif dan tegas soal urusan keamanan kawasan Jepang, ia juga selama menjalankan roda pemerintahan, banyak

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sarah Lohschelder, “Why Russia and Japan Can’t Solve the Kuril Islands Dispute,” *The Diplomat*, diakses melalui <https://thediplomat.com/2016/06/why-russia-and-japan-cant-solve-the-kuril-islands-dispute/> pada 3 Juli 2022.

¹⁷ “Analysis: Why Kuril dispute will not end any time soon,” *BBC News*, diakses melalui <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11665770> pada 3 Juli 2022.

menciptakan kebijakan-kebijakan terhadap penguatan posisi Jepang dalam sengketa Kepulauan Kuril dengan Rusia, meskipun belum dapat dikatakan berhasil.

PEMBAHASAN

SENGKETA KEPULAUAN KURIL ANTARA RUSIA DAN JEPANG

Jepang berada dibawah pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe, yang sebelumnya sudah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 3 periode berturut-turut terhitung mulai tahun 2006.¹⁸ Abe yang dikenal sebagai politikus konservatif yang agresif, namun juga diplomatis, memberikan harapan besar bagi Jepang untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan Rusia. Semasa jabatannya, Abe memiliki ambisi untuk meningkatkan hubungan jepang dengan Rusia, yang bahkan hal tersebut menjadi salah satu kebijakan luar negeri Jepang saat itu.

Strategi Abe dalam menjalin hubungan dengan Rusia ditempuhnya melalui kegiatan kunjungan ke Moskow, yang dimana hal tersebut menjadi pertama kalinya untuk Rusia kedatangan seorang Perdana Menteri Jepang. Sejak kedatangannya pertama kali di Moskow, Abe terus mencoba untuk meningkatkan *individual engagement*-nya dengan Presiden Putin¹⁹. Upaya pendekatan yang dilakukan Abe terhadap Putin dapat dikatakan cukup berhasil, mengingat hubungan antara keduanya kemudian menciptakan berbagai macam dialog antara Jepang dan Rusia. Menurutnya, semakin intens hubungan Abe dan Putin, maka semakin besar potensi Jepang untuk sesegera mungkin menyelesaikan sengketa Kepulauan Kuril dengan Rusia. Namun, hingga penelitian ini dilakukan sengketa ini masih belum menemukan titik terang, perubahan kebijakan luar negeri yang diambil oleh Shinzo

Abe dapat menjadi pengaruh masih berlangsungnya sengketa ini dan adanya kepentingan dari Jepang yang ingin dicapai melalui kebijakan diplomasi Shinzo Abe pada periode 2015-2020. Kurun waktu tahun 2015-

¹⁸ Brown, "Abe's 2016 Plan to Break the Deadlock in the Territorial Dispute with Russia", *The Asia-Pacific Journal Volume 14, Issue 4, Number 1, 1-25*, 2016, p. 3.

¹⁹ Ibid, p. 6

2020 diambil dalam penelitian ini dikarenakan tahun-tahun tersebut merupakan tahun terakhir dari masa jabatan Shinzo Abe selaku Perdana Menteri, sehingga dinilai dengan kurun waktu demikian, dapat memberikan jawaban lebih spesifik terhadap pertanyaan penelitian ini.

4.1 Upaya Jepang mempertahankan *Status Quo Balance of Power*

4.1.1 Keuntungan Jepang Dari Hegemoni Amerika Serikat

Hegemoni Amerika Serikat semakin meningkat pasca terjadinya Perang Dingin, dimana AS berhasil mengalahkan Uni Soviet dalam perang ideologi antara liberalisme dan komunisme. Karakteristik liberalisme AS kemudian menguat seiring dengan dengan sejarah dunia yang sedikit banyaknya melibatkan AS sebagai aktor dominan yang kemudian menjadi negara hegemon. Hegemoni sendiri berkaitan dengan ide dan aksi suatu negara sebagai kekuatan imperial yang mampu menciptakan preferensi bagi negara-negara lainnya. Dalam hal ini AS tidak hanya mendominasi kekuatan *hard power* melalui militer dan ekonominya, namun juga *soft power* yang mencakup budaya, ideologi dan institusi. Bahkan nilai demokrasi dan kebebasan individu menjadi cerminan yang diekspresikan oleh negara-negara lain dalam kehidupan bernegara dan bersosial. Secara singkat, hegemoni mencakup nilai, kepercayaan, ide dan budaya praktis yang muncul, kemudian mendominasi dan berdampak besar pada *mindset* dan budaya sosial seluruh dunia.²⁰

Salah satu yang memiliki keterikatan erat dengan AS adalah Jepang. Dimana Jepang menjalin kerjasama aliansi sejak 1951, dan juga merupakan *partner* signifikan di berbagai area kebijakan luar negeri.²¹ Bahkan Jepang menjadi salah satu dari empat *partner* terbesar AS dalam bidang ekonomi dan investasi. Melalui hubungan erat tersebutlah, Jepang mulai merasakan berbagai keuntungan yang

²⁰ Kasiyarno, "American Dream: The American Hegemonic Culture and Its Implications to The World", diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/4652/4112>, pada 6 Oktober 2022.

²¹ "U.S.-Japan Relations", Congressional Research Service, 2022, diakses dari <https://sgp.fas.org/crs/row/IF10199.pdf>, pada 6 Oktober 2022.

bisa didapatkan dari hubungannya dengan AS yang telah terjalin lama. Jepang sendiri menikmati keuntungan yang didapatkannya dari posisi AS sebagai hegemoni, dibanding menjadi pengganti posisi negara hegemon itu sendiri.²² Pasca perang dingin, Jepang menempatkan dirinya sebagai aliansi AS dengan merefleksikan nilai-nilai yang dipegang AS yakni liberal-demokrasi, dan berupaya beradaptasi dengan keteraturan liberal. Keputusan itu dimotivasi oleh dasar 'ontologi' daripada 'transaksional'.²³

Pada masa Perang Dingin, Jepang merubah strategi atau cara diplomasinya dengan beradaptasi untuk berkontribusi dengan kepemimpinan AS yang berfokus pada ekonomi daripada isu militer. Motivasi Jepang semakin meningkat dengan keuntungan-keuntungan yang didapatnya, yang kemudian untuk mendapat keuntungan maksimal, Jepang bergabung dengan *the General Agreement on Tariffs and Trade* dan *the Organization for Economic Cooperation and Development*. Seiring berjalannya waktu, posisi status dan identitas Jepang semakin meningkat dalam keteraturan liberal.

Jepang kemudian semakin dalam terlibat lebih dalam untuk dapat meningkatkan reputasinya di dunia dengan berusaha bergabung dengan PBB dan berusaha untuk mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB. Bergabungnya Jepang dengan berbagai sistem yang dipimpin oleh AS, berdampak pada peningkatan ekonomi secara signifikan pada awal tahun 1960-an. Dengan kekuatan tersebut, Jepang mampu mempengaruhi keteraturan ekonomi dunia pada 1970-an. Pada 1970-an, Jepang pun berusaha berkomitmen lebih jauh terhadap kepemimpinan AS, yakni secara aktif melakukan diplomasi di berbagai negara-negara di Asia dan sekitarnya. Jepang masuk

²² Koji Taira, "Japan, an Imminent Hegemon?", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*

Vol. 513, *Japan's External Economic Relations: Japanese Perspectives*, Sage Publications, 1991, p. 151, diakses dari https://www.jstor.org/stable/1047088#metadata_info_tab_contents, pada 8 Oktober 2022.

²³ Nobuhiko Tamaki, "Japan's quest for a rules-based international order: The Japan-US alliance and the decline of liberal hegemony", 2020, diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13569775.2020.1777041>, pada 8 Oktober 2022.

melalui ranah ekonomi, dengan metode damai dan penawaran peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut.²⁴

Dampak Perubahan Status Quo dan Hegemoni AS terhadap

Jepang

Aliansi dengan AS yang dilakukan Jepang bertujuan untuk memastikan bahwa Jepang mendapatkan keteraturan internasional yang dipimpin oleh AS.²⁵ Dalam kata lain, Jepang menggunakan AS sebagai penyedia keamanan melalui pangkalan militernya di Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa apabila hegemoni AS menurun sedikit demi sedikit maka Jepang sebagai mitra AS harus berusaha mempertahankan keamanannya sendiri, dengan meningkatkan anggaran pertahanan negara secara signifikan. Keteraturan yang sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama tentunya memerlukan perombakan dan perhitungan lebih lanjut, dimana hal ini tentu dianggap kurang efektif dibandingkan dengan mempertahankan keteraturan yang sudah ada sebelumnya. Penurunan pengaruh dan posisi AS tersebut tentunya akan menjadi suatu permasalahan yang dapat menghambat kondisi ekonomi dan keamanan Jepang, mengingat pasca Perang Dingin kondisi keamanan Jepang meningkat secara signifikan.

Kekuatan Jepang dianggap signifikan di kawasan Asia Timur, hal ini tidak terlepas dari bantuan AS dalam revitalisasi posisi Jepang dalam bidang ekonomi maupun militer. Bersaingnya kekuatan AS dengan China akan berdampak kepada penurunan posisi Jepang di kawasan Asia Timur, dan ini tidak hanya terjadi pada Jepang saja. Mengingat negara-negara seperti Korea Utara dan Taiwan pun mendapatkan bantuan dari AS. Disamping itu, dominasi China di pasar Asia juga dapat menyaingi dan menggeser pasar Jepang dan akan berdampak kepada defisit perdagangan.²⁶ Dimana semenjak

²⁴ Op.cit, Tamaki, p. 388

²⁵ Op.cit, Tamaki, p. 384

²⁶ Min-Hua Chiang, "The US Hegemony, East Asia and Global Governance, Bandung: Journal of Global South", 2015, p. 439. DOI 10.1186/s40728-015-0023-9

1970an AS membawa Jepang menjadi negara dominan di kawasan Asia dalam sistem ekonomi kapitalis.²⁷

Disamping itu, banyak perjanjian internasional yang terbentuk dan dipimpin oleh AS. Hal ini menjadi pertanyaan, apabila hegemoni AS menurun, akankah perjanjian-perjanjian tersebut juga berkurang nilai dan komitmen penerapannya? Hal ini muncul dikarenakan AS menjadi aktor yang memiliki peran kuat dalam penjagaan dan penerapannya. Hal ini tentu mengancam keselamatan dan posisi Jepang dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang keamanan teritorial di kawasan Kuril *Island*.

Apabila hegemoni AS turun dan digantikan, maka secara terbuka pengaruh AS tidak lagi menjadi sumber terkuat, yang dimana hal ini dapat menggeser keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh negara-negara aliansi. Tidak terkecuali Jepang yang mendapatkan keuntungan dari keputusan Perjanjian San Fransisco 1951, yang menyatakan bahwa Pulau Kuril sepenuhnya bukan merupakan bagian dari teritorial Rusia

4.1.3 Upaya Jepang Mempertahankan Status Quo

Upaya Jepang dalam mempertahankan dan mendukung hegemoni AS bukan semata-mata sebagai bagian negara yang menganut sistem liberal. Namun Jepang mengejar kepentingan nasionalnya yang terkait erat AS, mengingat Jepang merupakan salah satu aliansi AS yang dinilai memiliki kekuatan signifikan. Kepentingan nasional dalam hal ini mencakup ekonomi, keamanan dan juga prestise. Untuk itu, dibawah pemerintahan Shinzo Abe, Jepang berupaya untuk terus memperkuat aliansinya dengan AS dengan menerapkan prinsip dan nilai liberal.

Jepang di bawah pemerintahan Shinzo Abe menerapkan nilai-nilai liberal yang mencakup demokrasi, HAM dan upayanya untuk mencoba meng-*counter* kekuatan China yang terus

²⁷ Ibid, Chiang, p. 438.

meningkat dan menjadi ancaman bagi hegemoni AS. Untuk dapat mengamankan negaranya dari ketidakstabilan, Abe berusaha untuk menerapkan nilai-nilai liberal sebagai upaya mencapai *balance of power* dalam melakukan hubungan internasional. Nilai-nilai tersebut diterapkan dengan cara aliansi dan melakukan pendekatan kepada beberapa negara melalui diplomasi klasik. Upaya ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan *status quo* yang diciptakan oleh hegemoni AS untuk mencapai keteraturan.

Dalam hal ini Jepang masuk ke dalam tipe negara yang mendukung status quo dan merasa puas akan keteraturan yang tercipta melalui distribusi kekuasaan. Hal ini kemudian dibuktikan dengan upaya Jepang dalam mempertahankan status quo dengan membayar berapapun harga yang harus dikeluarkannya, dengan tujuan utama untuk melestarikan sistem internasional.

Dalam upayanya, Abe mendeskripsikan negaranya sebagai a) liberal institusionalisme, b) berargumen bahwa Jepang merupakan negara *anti-China balancer*, c) mengidentifikasi bahwa Jepang sebagai pencari kepentingan pragmatis.²⁸ Internasionalisme Jepang sendiri memiliki tiga asumsi. Pertama, Jepang menganggap bahwa supremasi AS yang menganut nilai liberal secara universal tidak dapat dibatalkan. Kedua, AS yang memegang dan mempertahankan nilai liberal akan menciptakan kondisi yang stabil bagi Jepang sebagai bagian dari pelaku ekonomi dan non-tradisional yang berkontribusi pada keteraturan yang diciptakan oleh AS. Ketiga, Jepang merasa tidak perlu untuk berkomitmen secara langsung pada penciptaan keamanan melalui militer maupun diplomasi.²⁹

Penurunan posisi AS sebagai negara *super-power* yang sedikit demi sedikit tergeser oleh kemunculan China akan memberikan dampak yang begitu besar. Bahkan dampak-dampak

²⁸ Ibid, Tamaki, p. 386

²⁹ Ibid, Tamaki, p. 392

tersebut sudah muncul dalam satu dekade terakhir. Salah satunya adalah banyaknya negara yang tidak lagi menggantungkan diri pada bantuan ekonomi AS, yang kemudian beralih ke China. Selain itu China juga mengedepankan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan berbagai negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. China tidak hanya masuk melalui jalur ekonomi seperti investasi, namun juga melalui kekuatan militer. China sedikit demi sedikit meningkatkan kemampuan militernya, dan menampilkannya melalui berbagai tindakan, salah satunya ekspansi China melalui maritim di berbagai kawasan. Contohnya adalah beberapa kali kapal militer China berlayar di wilayah perairan Jepang, yang mana hal ini mengancam teritorial Jepang. Penjaga Pantai Jepang bahkan menuntut agar kapal penjaga pantai China meninggalkan perairan teritorial Jepang dalam foto tak bertanggal ini. (Penjaga Pantai Jepang).³⁰

Perluasan pengaruh China tidak hanya berdampak kepada penurunan status quo AS sebagai hegemoni, namun juga pada negara-negara aliansinya, salah satunya Jepang yang sudah menjalin kerjasama sejak beberapa tahun awal kemerdekaannya. Hubungan yang terjalin lebih dari 5 dekade tentunya telah menjadi sistem yang sudah terpatri dalam berbagai aspek dalam dan luar negeri Jepang. Hal ini mengartikan apabila terdapat perubahan, terutama apabila perubahan tersebut dinilai signifikan, akan membawa Jepang kepada kondisi baru yang belum tentu menguntungkannya. Untuk itulah, Jepang berusaha sebaik mungkin untuk menjaga status quo yang selama ini berjalan.

Berangkat dari hal tersebut, Jepang menegaskan komitmen keamanan bersama AS dengan memperkuat aliansi keamanan. Di bawah pemerintahan Shinzo Abe, bersama dengan AS berupaya

³⁰ https://www.stripes.com/theaters/asia_pacific/2022-08-01/senkaku-japan-china-taiwan-pelosi-6837215.html

untuk merevisi Pedoman Kerjasama Pertahanan AS-Jepang, dan memperluas kerjasama guna mencapai perdamaian dengan berbagai negara.³¹ Disamping itu, Abe juga berupaya untuk meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara-negara aliansi AS, seperti Australia, India dan Uni Eropa (*security diamond*). Jepang juga secara resmi mulai lebih sering menggunakan kalimat Indo-Pacific, dibanding Asia-Pacific, untuk merujuk kepada liberal yang menentang China.

Usaha Jepang tidak berhenti disitu, Jepang berusaha untuk masuk melalui kebijakan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas patroli angkatan laut di kawasan Asia Tenggara dengan menyediakan kapal dan pelatihan penjaga pantai.³² Dari sisi ekonomi, Jepang berusaha mengimbangi China dengan meningkatkan ketergantungan negara-negara Asia melalui kontribusi kerjasama ekonomi di berbagai kesempatan. Untuk mempertahankan hegemoni AS, Jepang berupaya untuk mempromosikan *the Trans-Pacific Partnership* (TPP) dengan negara-negara di Asia-Pasific dan AS. Sebaliknya, Jepang menolak untuk bergabung dengan the China-led Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Shinzo Abe untuk mempertahankan status quo adalah dengan memperkuat '*security network*' dengan Korea Selatan, Australia, negara-negara ASEAN dan India, dengan tujuan untuk menghalau pengaruh dan implementasi China untuk meningkatkan kapasitasnya di kawasan Asia Tenggara. Jepang juga melakukan penekanan berulang pada supremasi hukum untuk menjaga ketertiban internasional. Pada 2014, dalam Kajian Strategis *Asian Security Summit* (Shangri-La Dialogue) dengan tema Perdamaian dan Kemakmuran di Asia: *Forevermore: Japan for the Rule of Law, Asia for the Rule of Law, and the Rule of Law for All of Us*, Shinzo Abe

³¹ Ibid, Tamaki, p. 393

³² Ibid, Tamaki, p. 393

menganjurkan pentingnya menerapkan prinsip yang mempromosikan supremasi hukum. Diantaranya adalah Pertama: bahwa negara harus membuat dan mengklarifikasi klaim mereka berdasarkan hukum internasional, Kedua: negara tidak boleh menggunakan kekuatan atau paksaan untuk mendorong klaim mereka, Ketiga: negara harus menyelesaikan perselisihan dengan cara damai.³³

Dibawah pemerintahan Shinzo Abe, Jepang menekankan pada nilai diplomasi yang berfokus pada ekonomi domestik dan kondisi sosial yang dianggap krusial bagi negara berkembang. Diplomasi yang dilakukan oleh Jepang bertujuan untuk membangun jaringan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia-Pasific untuk membangun dan memperkuat nilai liberal. Menjaga nilai-nilai AS menjadi strategi untuk pencapaian *balance of power* terkait munculnya kekuatan baru China.

Pengaplikasian nilai dan kepercayaan liberal tidak hanya Jepang terapkan pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, namun juga pada negara dengan sistem demokrasi illiberal seperti Filipina, Turki, Arab Saudi. Dalam melakukan hubungan internasional, Jepang pun tidak membatasi diri dengan tidak melakukan kerjasama ataupun komunikasi dengan China sebagai negara yang dianggap dapat mengancam posisi AS sebagai hegemon. Jepang justru menerapkan nilai-nilai liberalnya seperti demokrasi dan HAM sebagai dukungan terkait HAM di Xinjiang pada 2019.³⁴ Bahkan Jepang meningkatkan hubungannya dengan China melalui program *Chinese Belt and Road Initiative* dalam upaya mempertahankan tatanan liberal. Inisiasi Jepang yang dinilai tidak memiliki visi nyatanya memiliki tujuan nyata, yaitu mengambil keuntungan secara ekonomi dari China, dan mendapatkan keamanan dari AS.

³³ MOFA, "Toward an alliance of hope", diakses dari https://www.mofa.go.jp/na/na1/us/page4e_000241.html, pada 9 Oktober 2022.

³⁴ Ibid, Tamaki, p. 396.

Walaupun kerjasama dengan China dinilai kontradiksi oleh para pakar hubungan internasional, namun Jepang dibawah Shinzo Abe menganggap bahwa ini merupakan salah satu strategi untuk dapat tetap menjaga status quo dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip liberal seperti pencapaian prinsip damai dalam mencapai kesepakatan konflik, pasar bebas, dan tendensi untuk mempromosikan demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia.

Salah satu motivasi kuat Jepang dalam mempertahankan status quo yakni AS sebagai negara hegemon yakni dengan upayanya dalam memastikan keteraturan dengan mempertahankan validitas *San Francisco Peace Treaty* yang menyatakan bahwa Pulau Kuril bukan merupakan bagian dari Rusia.

4.2 Upaya Jepang Mempertahankan legitimasi San Fransisco Treaty

Shinzo Abe dalam pemerintahannya mengedepankan isu *Northern Territories* atau Pulau Kuril sebagai salah satu utama dalam politik luar negeri yang harus dicapai. Prioritas ini terbentuk bukan tanpa alasan, Abe memiliki motif kuat dalam prioritas politiknya. Diantaranya adalah sebagai penerus jejak sang kakek, yakni Nobusuke Kishi, yang merupakan Perdana Menteri dari Partai Demokrat, yang juga merupakan salah satu aktor penting Jepang dalam kerjasama aliansi Jepang dengan AS pada 1960. Kemudian juga Bapak dari Shinzo Abe, yakni Shintaro Abe sebagai Menteri Luar Negeri yang memperjuangkan penyelesaian konflik Pulau Kuril. Dua faktor tersebut menjadi alasan keinginan Shinzo Abe dalam pencapaian penyelesaian sengketa Pulau Kuril yang sudah berlarut-larut sejak lama. Disamping itu, isu Pulau Kuril menjadi prioritas politik Shinzo Abe yang dikedepankan sebagai janji politik pada awal pemilihan Abe sebelum menjadi Perdana Menteri

Wilayah kepulauan Kuril memiliki sumber daya alam yang melimpah, terlebih masyarakat Jepang juga memiliki sejarah panjang di dalamnya. Kepulauan Kuril juga dikelilingi oleh gunung berapi, yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara melalui bidang pariwisata. Apabila Jepang memiliki akses terhadap pemanfaatan Pulau Kuril, maka Jepang akan dapat dengan leluasa memanfaatkan sumber daya yang berada di sekeliling ZEE tersebut untuk dapat meningkatkan devisa negaranya. Untuk itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk dapat secara resmi mendapatkan akses dan menjalin kerjasama dalam memanfaatkan 4 wilayah di Pulau Kuril. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti peningkatan hubungan diplomasi antara Jepang dan Rusia, peningkatan kerjasama ekonomi, juga upaya Jepang untuk mendukung status quo hegemoni AS dengan harapan untuk mendapatkan dukungan mengenai statusnya dalam kepemilikan Pulau Kuril dari AS

Sejarah Pulau Kuril sendiri begitu panjang. Dalam penyelesaiannya, telah lebih dari tiga perjanjian yang membahas sengketa pulau ini. Salah satu perjanjian yang dengan detail membahas kepemilikan pulau ini adalah *San Francisco Peace Treaty*. Dimana dalam draftnya pada Maret 1947 dinyatakan bahwa “*stipulate the ceding to the Soviet Union of the four islands as part of the Kurile Islands*” yakni penetapan bahwa empat pulau diserahkan kepada Uni Soviet sebagai bagian dari Pulau Kuril. Namun pada 5 Agustus 1947, keempat pulau tersebut dinyatakan berada dalam batas wilayah Jepang dan dalam Perjanjian Pertukaran Sakhalin untuk Kepulauan Kuril 1875 diserahkan ke Jepang oleh Uni Soviet. Pada Januari 1948 sekali lagi ditetapkan bahwa penyerahan Pulau Kuril masih perlu ditinjau lebih lanjut terkait wilayah Kuril Selatan (Kunashiri dan Etoforu), dan Habomai dan Shikotan. Selanjutnya rancangan tanggal 7 September 1949 dan 13 Oktober 1949 keduanya menganggap bahwa keempat pulau tersebut berada dalam batas teritorial Jepang dan menetapkan penyerahan Kepulauan Kurile kepada Uni Soviet secara eksklusif. Namun menurut catatan kaki draft 13 Oktober mengasumsikan bahwa Uni Soviet tidak

berpartisipasi dalam perjanjian, dan perjanjian itu tidak akan menetapkan penyerahan kepada negara-negara yang bersangkutan.³⁵

Komentar draft 13 Oktober mencatat bahwa terdapat kontroversi mengenai keempat pulau tersebut, sebagai pulau yang dijanjikan kepada Uni Soviet dibawah Yalta Agreement. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kecil kemungkinan bahwa Soviet akan menyerahkannya kepada Jepang, AS pun mengusulkan retensi oleh Jepang, karena ada kemungkinan bahwa Soviet akan menimbulkan niat buruk kepada orang-orang Jepang apabila mereka tidak mau menyerahkannya. Namun, pada draft terakhir dinyatakan bahwa Pulau Kuril (Memorandum 12, Maret 1951) dinyatakan bahwa kepulauan Kuril “sebagaimana ditentukan oleh perjanjian bilateral atau keputusan pengadilan berdasarkan prosedur sengketa perjanjian”³⁶ akan diserahkan kepada Uni Soviet. Namun hal ini masih menjadi pertimbangan, mengingat Rusia tidak mengikuti dan menandatangani perjanjian tersebut.

Pulau Kuril sendiri tercatat dalam administrasi Rusia dan diklaim oleh Jepang. Dalam upaya peningkatan hubungan diplomasi, Shinzo Abe menemui Putin di Moscow pada 5 Mei 2016. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketegangan yang terjadi selama beberapa tahun ketika Jepang bergabung dengan Barat dan menjatuhkan sanksi terhadap aksi Rusia di Krimea dan Ukraina Timur.³⁷ Namun respon Rusia setelah pertemuan tersebut diluar dugaan. Tiga minggu setelah pertemuan Abe dan Putin, Rusia mengerahkan sistem pertahanan pantainya dan membuka pangkalan angkatan laut baru di sekitar Pulau Kuril. Hal ini mengancam Jepang, dan Jepang pun melayangkan protes mengenai tindakan sepihak Rusia.

Tindakan Rusia menunjukkan bahwa sekali lagi kasus ini menemui jalan buntu. Upaya Jepang untuk masuk dan mencapai perdamaian melalui pendekatan baru nyatanya tidak berhasil. Tidak hanya Jepang,

³⁵ Op.cit, Takashi.

³⁶ Ibid, Takashi.

³⁷ Sarah Lohschelder, “*Why Russia and Japan Can’t Solve the Kuril Islands Dispute*”, The Diplomat, 2016, diakses dari <https://thediplomat.com/2016/06/why-russia-and-japan-cant-solve-the-kuril-islands-dispute/>, pada 10 Oktober 2022.

Rusia pun melihat pulau ini sebagai potensi strategis yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan geopolitik, serta menjamin akses yang dinilai aman melalui Laut Okhotsk ke Samudera Pasifik untuk Angkatan Laut Rusia.

Pertemuan mengenai pembahasan Pulau Kuril ini pun terus berlangsung, dimana salah satunya dilaksanakan di Jepang pada 15 Desember 2016 di Nagato. *The Nagato Summit Night* berlangsung secara singkat (hanya sekitar 90 menit). Dalam pertemuan tersebut Abe menjelaskan tiga poin terkait Pulau Kuril. Pertama, akan dibuat langkah-langkah mudah bagi mantan penduduk pulau tersebut untuk dapat mengunjungi Pulau Kuril. Kedua, kesepakatan mengenai rencana kegiatan ekonomi bersama, namun dengan catatan tidak melanggar kedaulatan masing-masing negara. Ketiga, perlunya perjanjian mendalam mengenai perjanjian damai.

Pertemuan tersebut pun dilanjutkan keesokan harinya, 16 Desember 2016. Pembahasan lebih lanjut mengenai poin-poin sebelumnya tidak begitu membawa angin segar. Dimana Putin tidak mengakui Deklarasi Tokyo 1993³⁸ yang menyebut bahwa keempat pulau tersebut sebagai subjek negosiasi bilateral. Namun Putin memberikan sinyal baik terhadap inisiasi untuk menyediakan visa bebas bagi mantan penduduk pulau-pulau tersebut. Kemudian terkait rencana pembangunan ekonomi bersama, Putin mengemukakan bahwa kerjasama tersebut harus di bawah hukum dan peraturan Rusia. Keputusan tersebut tentu ditolak oleh Jepang, yang kemudian sekali lagi upaya penyelesaian Pulau Kuril berada pada status stagnan.

Usaha Jepang tidak berhenti sampai disitu. Untuk mendapatkan kepentingannya, Jepang mengupayakan strategi damai yang dapat menguntungkan Jepang dan Rusia terkait Pulau Kuril dengan menjalin kerjasama dengan Rusia terkait pemanfaatan Pulau Kuril. Dalam pertemuannya di selanjutnya Moskow pada 26 Mei 2018, Jepang berusaha untuk mengimplementasikan proyek bisnis bersama sebagai

³⁸ Iwashita, p. 115.

cara untuk mendapatkan momentum untuk menyelesaikan perselisihan.³⁹ Bahkan Jepang menyiapkan tawaran insentif ekonomi untuk Rusia.⁴⁰ Shinzo Abe mengatakan bahwa kerjasama tersebut dapat membuahkan hasil yang saling menguntungkan. Upaya tersebut kemudian menarik perhatian Presiden Putin yang mengatakan bahwa delegasi bisnis Rusia akan mengunjungi Jepang untuk diskusi lebih lanjut.⁴¹

Agar dapat merealisasikan kerjasama tersebut, peran *San Francisco Peace Treaty* dianggap penting, karena perjanjian tersebut menyatakan bahwa Pulau Kuril bukanlah milik kedua negara. Dimana dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Jepang melepaskan Pulau Kuril ke Rusia akibat kekalahan Jepang dalam perang, dan Rusia juga bukanlah pihak dalam perjanjian tersebut karena tidak menjadi bagian dari perjanjian, maka pulau-pulau tersebut tidak menjadi wilayah Rusia di bawah *San Francisco Peace Treaty*.⁴² Dengan begitu kerjasama dapat dilakukan, dan peluang pencapaian keuntungan semakin terbuka. Hal ini akan sangat berbeda keadaannya apabila *Yalta Agreement* menjadi dasar, karena dalam kesepakatan tersebut tercantum bahwa bagian selatan wilayah Pulau Sakhalin yang merupakan bagian dari Pulau Kuril harus diserahkan kepada Uni Soviet (sekarang Rusia). Status kepemilikan tersebut juga berlaku pada Pulau Kuril. Klaim tersebut disepakati oleh para pemimpin dari tiga kekuatan besar, dan dapat dipenuhi setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua.⁴³

Jepang memprediksi bahwa upaya kerjasama dalam pengelolaan Pulau Kuril akan mencapai titik terang dan mencapai kesepakatan, namun nyatanya tidak juga membuahkan hasil. Terlebih ketika Jepang

³⁹ VOA, “*Putin, Abe Discuss Kuril Island, WWII Treaty*”, diakses dari <https://www.voanews.com/a/putin-abe-discuss-kuril-islands-wwii-treaty/4411351.html>, pada 10 Oktober 2022

⁴⁰ Martin Fritz, “*A Solution to the Kuril Islands dispute?*”, 2016 diakses dari <https://www.dw.com/en/a-solution-to-the-kuril-islands-dispute/a-36624291>, pada 10 Oktober 2022.

⁴¹ Ibid, VOA.

⁴² Tsukamoto Takashi, “*The Four Northern Islands and The San Francisco Peace Treaty*”, 2020, diakses dari <https://www.spf.org/islandstudies/research/a00022r.html>, pada 11 Oktober 2022.

⁴³ Tsukamoto Takashi, “*Russia’s Claim to Sovereignty over the Four Northern Islands*”, 2022, diakses dari <https://www.spf.org/islandstudies/research/a00021r.html#anc6>, pada 11 Oktober 2022.

meminta konsesi simbolis hak istimewa terkait Pulau Etorofu dan Kunashiri, juga meminta kembalinya Shikotan dan Habomai.⁴⁴ Permintaan tersebut, ditolak oleh Rusia dengan tiga alasan. Pertama, Rusia tidak memiliki sengketa teritorial dengan Jepang (walaupun Rusia mengakui klaim Jepang. Kedua, tidak ada dasar yang jelas atas klaim Jepang untuk Etorofu dan Kunashiri. Ketiga, tidak akan ada pemindahan kekuasaan atas Shikotan dan Habomai kepada Jepang, terlepas dari *Soviet-Japan Declaration* di tahun 1956.

Shinzo Abe terus mengupayakan sengketa Pulau Kuril hingga berpihak kepada Jepang didasarkan pada nilai dan fokus politik Abe sendiri. Untuk itu, Abe terus berupaya mengedepankan *San Francisco Peace Treaty* sebagai acuan. Upaya terus dilakukan oleh Shinzo Abe dengan upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia dan menyatakan harapan untuk penandatanganan kerjasama Pulau Kuril. Melalui hubungan yang baik, diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kedaulatan pulau-pulau yang disengketakan.

Untuk membantu merealisasikan kebijakan tersebut, media Jepang diikutsertakan melalui program-program televisi seperti berita dan juga program cuplikan eksekutif. Sesaat setelah pertemuan dengan Rusia, Abe sendiri yang tampil dan mengumumkan hasil dari pertemuan, hal ini dilakukan beberapa kali. Dengan begitu opini masyarakat terbentuk dan mendukung realisasi penyelesaian sengketa tersebut secara lebih luas. Program TV Jepang pun menampilkan cuplikan terkait masyarakat Jepang yang sebelumnya merupakan penghuni Pulau Kuril menulis surat untuk Presiden Putin. Surat tersebut ditulis oleh enam mantan penduduk, dengan berbagai variasi latar belakang, gender dan usia, termasuk presiden asosiasi penduduk pulau tersebut. Surat itu menyatakan keinginan masyarakat tersebut untuk dapat mengunjungi kembali pulau kelahiran mereka. Namun nyatanya surat itu tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap perhatian Putin kepada kerjasama tersebut.

⁴⁴ Op.cit, Iwashita, p. 113.

Sejauh ini sudah lima pertemuan dilakukan antara Abe dan Putin, namun juga belum menemui jalan tengah dan mencapai kesepakatan. Terdapat beberapa hal menjadi dasar belum ditemukannya solusi tersebut. Pertama, Rusia menganggap Kuril Selatan sebagai rampasan yang sah setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Kedua, kini ribuan orang Rusia tinggal di kawasan tersebut, dan penduduk tersebut telah menerima berbagai bantuan ekonomi khusus dari pemerintah Rusia sejak 2007. Ketiga, instalasi militer Rusia telah dibangun di pulau-pulau tersebut.

Dalam prosesnya, Jepang juga mendapatkan dukungan dari AS sebagai aliansinya. Dimana hal ini diungkapkan bahwa secara jelas AS mendukung Jepang dalam masalah *Northern Territories* dan telah mengakui kedaulatan Jepang atas empat pulau yang disengketakan sejak 1950-an.⁴⁵ Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Perwakilan Luar Negeri AS di Jepang, Rahm Emanuel. Beliau juga mengungkapkan bahwa akan mencoba membantu Jepang dalam upaya mencapai perjanjian damai yang telah lama tertunda. Hegemoni AS sekali lagi memberikan peran dukungan bagi Jepang dalam upayanya mencapai kesepakatan dengan Rusia dalam kasus sengketa Pulau Kuril.

KESIMPULAN

Upaya Jepang untuk mencapai kepentingan negaranya di Pulau Kuril dicapai melalui diplomasi berkelanjutan di bawah pemerintahan Shinzo Abe. Upaya ini dilakukan untuk mencapai kerjasama pemanfaatan pulau tersebut yang kemudian dihadapkan dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, dan memperbaiki hubungan Jepang dan Rusia. Untuk dapat mencapainya, Jepang berusaha untuk mempertahankan hegemoni AS agar dapat mempertahankan posisinya dalam struktur internasional. Dimana hal ini dapat membantu Jepang untuk mencapai kesepakatan di Pulau Kuril melalui dukungan AS sebagai aktor dominan internasional.

⁴⁵ Patrick Semansky, TASS, “*Washington Recognizes Japan’s Sovereignty over Four Northern Islands in Southern Kurils-US Envoy*”, diakses dari <https://tass.com/world/1399083>, pada 13 Oktober 2022.

Setelah beberapa kali pertemuan, upaya Jepang belum juga memberikan hasil dan mencapai kesepakatan. Walaupun hingga kini Jepang berupaya untuk mempertahankan legitimasi *San Francisco Peace Treaty* sebagai dasar kerjasama, namun Rusia melihat bahwa pulau tersebut bukanlah objek sengketa bilateral, sehingga sangat sulit mencapai situasi ideal dalam kepemilikan dan pemanfaatan Pulau Kuril yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki sejarah panjang di dalamnya bagi masyarakat Jepang. Bisa dianggap bahwa upaya-upaya mempertahankan status quo adalah *last resort* bagi Jepang untuk tetap dapat menjalankan aktivitas mereka di wilayah tersebut tanpa khawatir adanya intervensi dari pihak lain.

REFERENSI

- Allison, G. (1971). *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Boston: Little Brown.
- Almond, G. A. (1956). *Comparative Political System*. *The Journal of Politics* Vol. 18, No. 3, 391-409.
- Al-Rasyid, M. H. (2015). *Penyelesaian Sengketa Status Kepemilikan Kepulauan Kuril Selatan Antara Rusia dan Jepang Menurut Hukum Internasional*. Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Anna Kuchma, "Kuril Islands may get special economic zone status," *Russia Beyond*, diakses pada 1 Agustus 2022, https://www.rbth.com/business/2015/08/06/kuril_islands_may_get_special_economic_zone_status_48289.html
- B, Fitzhugh, Gjesfeld, E. W., Brown, W. A., Hudson, M. J., & Shaw, J. D. "Resilience and the population history of the Kuril Islands, Northwest Pacific: A study in complex human ecodynamics". *Quaternary International*. Vol. 4. No. 19 (2016) 165-193. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.02.003>
- BBC News, "Kuril Islands dispute between Russia and Japan," diakses pada 30 Juli 2022, <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11664434>
- Belov, Andrey. "Regional Dimension of Economic Cooperation Between Japan and Russia". *Journal of East-West Business*. Vol. 11. No. ½ (2005) 119-140.
- Binsasi, Anto. (2020) "Perjanjian Shimonoseki, Lepasnya Wilayah Korea dari Tangan Cina ke Jepang". *Mata Indonesia News* (18 April 2020) internet. 12 September 2022. <https://www.minews.id/kisah/perjanjian-shimonoseki-lepasnya-wilayah-korea-dari-tangan-cina-ke-jepang>

- Biswas, Bidisha dan Goel, Anish. What Comes After US Hegemony? The Asia-Pacific region looks beyond the United States. *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2018/12/what-comes-after-us-hegemony/>.
- Brown, J. D. (2016). Abe's 2016 Plan to Break the Deadlock in the Territorial Dispute with Russia. *The Asia-Pacific Journal* Volume 14, Issue 4, Number 1, 1-25.
- Buntilov, G. (2017). The Kuril Islands/Northern Territories Dispute: A Comparison of local news reportage in Sakhalin and Hokkaido. *Electronic Journal of Contemporary Japanese Studies* Vol. 17, Issues 3, 17-34.
- Burchill, S., Linklater, A., & Devetak, R. (2005). *Theories of International Relations* 3rd Edition. New York: Palgrave Macmillan.
- Cashman, G. (1993). *What Causes War? An Introducing to Theories of International Conflict*. New York, Lexington Books: Lexington Books.
- Chan, J. (2006). Russian Shooting of Japanese Fisherman Heightens Tensions over Kuril Islands. New York: World Socialist Web Site. Retrieved from <https://www.wsws.org/en/articles/2006/08/japa-a31.html>
- Chiang, Min-Hua. (2015). The US Hegemony, East Asia and Global Governance, Bandung: *Journal of Global South*. DOI 10.1186/s40728-015-0023-9. 439.
- Creswell, J. w. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Detty Oktaviani Kusumaningrum. "Peningkatan Kerjasama Energi Jepang-Rusia di tengah Sengketa Kepulauan Kuril". skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Easton, D. (1957). An Approach to the Analysis of Political System. *World Politics* Vol.9, No. 3, 383-400.
- F.Giblin, J. (1987). National Strategies and Japan's Northern Territories. *Naval War College Review*, Winter 1987, Vol. 40, No. 1, 53-68.
- Fitriyah, Y., & Puspitasari, A. (2017). Diplomasi Jepang terhadap Rusia dalam Penyelesaian Sengketa Kepulauan Kuril Selatan pada masa Pemerintahan Shinzo Abe (2012-2016). *Budi Luhur Journal of Contemporary Diplomacy* Vol.1, No.1, 47-61. Retrieved from <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/201>
- Fritz, Martin. (2016). A Solution to the Kuril Islands dispute?. Retrieved from <https://www.dw.com/en/a-solution-to-the-kuril-islands-dispute/a-36624291>.
- Garceau, O. (1953). Reviewed Work: *The Political System: An Inquiry into the States of Political Science* by David Easton. *Political Science Quarterly* Vol. 68, No. 3, 434-436.
- Gavrilov, V. (2016). Challenges and Prospects of the Southern Kuril Islands' Status. *Mediterranean Journal of Social Sciences* Vol. 7, No. 1, 301-306.

- Ghosh, S. (1975). Decision, Process and Power: A Conceptual Approach. *The Indian Journal of Political Science* Vol. 36, No. 4, 344-357.
- Global Times. "Russia's Kuril Islands investment promotion draws investors from India, China, among other countries: report". diakses pada 2 Juli 2022, <https://www.globaltimes.cn/page/202204/1258821.shtml>
- Hardani, Andriani, h., Fardani, R., & Sukmana, D. J. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sleman: CV. Pustaka Ilmu.
- History. "U.S. announces policy of "massive retaliation" against Communist aggressors". internet. 12 September 2022. <https://www.history.com/this-day-in-history/dulles-announces-policy-of-massive-retaliation>
- History. "Yalta Conference". (4 November 2019) internet. 12 September 2022. <http://www.history.com/topics/world-war-ii/yalta-conference>
- Hobbes, T. (2012). Chapter XIII - Of the Natural Condition of Mankind as Concerning Their Felicity and Misery. In P. R. Viotti, & M. V. Kauppi, *International Relations Theory* %th Edition (pp. 90-95). New York: Pearson Education Inc.
- Hudson, V. M., & Day, B. S. (2020). *Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory*. London: Rowman & Littlefield.
- Hurd, I. (2017). Legitimacy in International Politics. In R. J. Art, & R. Jervis, *International Politics: Enduring Concept and Contemporary Issues* 13th Edition (pp. 16-19). New York: Pearson Education Inc.
- Iwashita, Akhiro. "The Northern Territories and Russo- Japan Relations- Backdrop of the Territorial Dispute. Sapporo". (*Russian Analytical Digest- RAD*, No. 132, 2013).
- K, N. Khristoforova Tsygankov, V. Y., Lukyanova, O. N., & Boyarova, M. D. "The Kuril Islands as a potential region for aquaculture: Trace elements in chum salmon". *Environmental Pollution*. Vol. 2. No. 13 (2016) 727-731. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.03.027>
- Kaczynski, V. M. (2013). The Kuril Islands Dispute Between Russia and Japan: Perspectives of Three Ocean Power. *russian analytical digest* 20/07, 1-8.
- Kamalakaran, Ajay. (2020) "Southern Kuril Islands: Volcanoes, waterfalls and natural springs". *Russia Briefing*, diakses pada 2 Juli 2022, https://www.rbth.com/arts/travel/2013/07/22/southern_kuril_islands_volcanoes_waterfalls_and_natural_springs_27383
- Kapur, K. (2013). *Russia-Japan Relations: Politico-strategic Importance of the Disputed Southern Kurile Islands/Northern Territories*. *India Quarterly: A Journal of International Affairs* vOL. 68 Issue 4, 385-405.
- Kasiyarno. *American Dream: The American Hegemonic Culture and Its Implications to The World*. Retrieved from <https://jurnal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/4652/4112>.

- Kazumine, Akimoto. "The Strategic Value of Territorial Islands from the Perspective of National Security". The OPRI Center of Island Studies (9 Oktober 2013) internet. 10 September 2022. <https://www.spf.org/islandstudies/research/a00008.html>
- Korzhov, N. (2016). The Kurils: A difficult life on the disputed islands. Kurislisk: Aljazeera. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/amp/features/2016/12/15/the-kurils-a-difficult-life-on-the-disputed-islands>
- Kozinets, Andrei dan James D.J. Brown. "What Does a Kishida Government Mean for Japan-Russia Economic Relations?". The Diplomat (14 Oktober 2021) internet. 12 September 2022. <https://thediplomat.com/2021/10/what-does-a-kishida-government-mean-for-japan-russia-economic-relations/>
- Kuo, Mercy A. "Ukraine War: The Impact on Japan-Russia Relations". The Diplomat (16 Mei 2022) internet. 9 September 2022. <https://thediplomat.com/2022/05/ukraine-war-the-impact-on-japan-russia-relations/>
- Lohschelder, Sarah. (2016). Why Russia and Japan Can't Solve the Kuril Islands Dispute. The Diplomat. Retrieved from <https://thediplomat.com/2016/06/why-russia-and-japan-cant-solve-the-kuril-islands-dispute/>.
- MacDonald, P. (2003). Useful Fiction or Miracle Maker: The Competing Epistemological Foundations of Rational Choice Theory. *American political Science Review* 97(4), 551-565.
- Manan, M. (2015). Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques. *Jurnal Global Strategis* Vol.9, No.2, 175-189. Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/6902/4121>
- Mansbach, R. w., & Rafferty, K. L. (2008). *Introduction to Global Politic*. New York: Rotledge.
- Manullang, E. F. (2010). Nicollo Machiavelli: Sang Belis Politik? : Suatu Refleksi dan Kritik Filosofis terhadap Gagasan Politik Machiavelli dalam II Principle. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-40*, No.4, 517-536.
- Maria Shagina. "Sanctions in Japan-Russia Economic Relations: Impact and Adaption". Institute for Security and Development Policy (Juni 2019) internet. 12 September 2022. <https://isdp.eu/content/uploads/2019/06/Sanctions-in-Japan-Russia-Economic-Relations-FA-Final.pdf>
- McDevitt, M. A., & Gorenburg, D. (2013). *The Long Littoral Poject: Sea of Japan: A maritime Perspective on Indo-Pacific Security*. CNA Analysis and Solutions, 1-48.

- Mearsheimer, J. J. (2016). *Anarchy and the Struggle for Power*. In R. J. Art, & R. Jervis, *International Politics: Enduring Concept and Contemporary Issues* 13th edition (pp. 70-78). New York: Pearson.
- Media Indonesia. "1868: Era Shogun Berakhir". (3 Januari 2018) internet. 10 September 2022. [https://mediaindonesia.com/humaniora/138933/1868-era-shogun-berakhir#:~:text=KESHOGUNAN%20Tokugawa%20atau%20Keshogunan%20Edo,Edo%20\(sekarang%20disebut%20Tokyo\).](https://mediaindonesia.com/humaniora/138933/1868-era-shogun-berakhir#:~:text=KESHOGUNAN%20Tokugawa%20atau%20Keshogunan%20Edo,Edo%20(sekarang%20disebut%20Tokyo).)
- Micallef, Joseph. "Japan Strikes North: How the Battle of Khalkhin Gol Transformed WWII". *Military.com* (27 Agustus 2019) internet. 12 September 2022. <https://www.military.com/daily-news/2019/08/27/japan-strikes-north-how-battle-khalkhin-gol-transformed-wwii.html>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2001, March 1). *Japanese Territory*. Retrieved from Joint Compendium of Documents on the History of Territorial Issue between Japan and Russia: <https://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/edition92/period1.html>
- Mintz, A., & DeRouen, K. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MOFA. *Toward an alliance of hope*. Retrieved from https://www.mofa.go.jp/na/na1/us/page4e_000241.html.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monica, S., & Tjarsono, I. (2019). *Strategi Jepang Menghadapi Rusia terhadap Sengketa Kepulauan Kuril tahun 2008-2012*. *Jurnal Online Mahasiswa* Vol.1, No.1, 1-11. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/2262>
- Morgenthau, H. J. (2017). *Six Principle of Political Realism*. In R. J. Art, & R. Jervis, *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues* 13th edition (pp.19-38). New York: Pearson Education Inc.
- Nikkei staff writers. "Russia halts peace treaty talks with Japan over sanctions". *Nikkei Asia* (22 Maret 2022) internet. 8 September 2022. <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Russia-halts-peace-treaty-talks-with-Japan-over-sanctions>
- Nikola, Mikovic. "Why Rusia will not return the Kuril Islands to Japan". *The Intrepreter Web Site*, 2020, diakses melalui <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-russia-will-not-return-kuril-islands-japan> pada 4 April 2022.
- Northern Territories Issue Association. "History of the Northern Territories Issue". internet. 10 September 2022. <https://www.hoppou.go.jp/en/problem-info/know/islands-history.html>

- Nye, J. (2004). Soft Power and American Foreign Policy. *Political Science Quarterly* Vol. 119, No. 2, 255-270.
- Nye, J. S. (2017). What is Power in Global Affairs? In R. J. Art, & R. Jervis, *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues* (pp. 41-47). New York: Pearson Education Inc.
- Observatory of Economic Complexity World. (2022). "Japan – Russia" Observatory of Economic Complexity World, <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/jpn/partner/rus>
- Office of the Historian. "The Treaty of Portsmouth and the Russo-Japanese War, 1904-1905". internet. 12 September 2022. <https://history.state.gov/milestones/1899-1913/portsmouth-treaty>
- Pessoa, Carolina. "The Kuril Islands Dispute". Conference Paper, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2020
- Quillen, A. B. (1992). The Kuril Islands or the Northern Territories: Who Owns Them - Islands Territorial Dispute Continues to Hinder Relations between Russia and Japan. *North Carolina Journal of International Law* Vol. 18, No. 3, 633-660.
- Radchenko, Sergrey. "Japanese Business, Soviet Development, and Territorial Conflict, 1975-1985". *The Asia Pacific Journal*. Vol. 9. No. 1 (30 Agustus 2011) <https://apjif.org/-Sergey-Radchenko/3592/article.pdf>
- Rapp-Hooper, M. (2014, December 3). A Treaty to End WW II for Russia and Japan? Retrieved from Asia Maritime Transparency Initiative: <https://amti.csis.org/a-treaty-to-end-wwii-for-russia-and-japan/>
- Rapry, A. S. (2014). *Kepentingan Rusia dalam Kerjasama Proyek Sakhalin 1 Dengan Jepang tahun 1996-2003*. Skripsi Sarjana Ilmu Sosial Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Reuters. "Japan protests Russian halt to World War Two peace treaty talks". (22 Maret 2022) internet. 8 September 2022. <https://www.reuters.com/world/russia-halts-japan-peace-treaty-talks-over-sanctions-2022-03-21/>
- Riyaz, UI Khaliq. "Totally Unacceptable: Japan reject Russia's halt to Kuril Islands peace talks". AA Web Site, 2022, diakses melalui <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/totally-unacceptable-japan-rejects-russias-halt-to-kuril-islands-peace-talks/2542142> pada 4 April 2022.
- Russia Briefing. "Russia Considering Making the Kuril Islands A Free Trade Zone". diakses pada 1 Juli 2022, <https://www.russia-briefing.com/news/russia-considering-making-the-kuril-islands-a-free-trade-zone.html/>
- S.M. Noor. 2015. "Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril". Makassar: Pustaka Pena Press.

- Sacko, D., & Winkley, M. (2020). All Quiet on the Eastern Front: Japan and Russia's Territorial Dispute. *Journal of Indo-Pacific Affairs*, 22-42.
- Salmon, Andrew. "Japan-Russia ructions roiling Pacific waters". *Asia Times* (2 Mei 2022) internet. 9 September 2022. <https://asiatimes.com/2022/05/japan-russia-ructions-roiling-pacific-waters/>
- Satake, Tomohiko. "How Japan's Russia policy changed after Ukraine". *East Asia Forum* (24 Juni 2022) internet. 8 September 2022. <https://www.easiaforum.org/2022/06/24/how-japans-russia-policy-changed-after-ukraine/>
- Schoenbaum, Thomas J. 2008. "Peace in Northeast Asia: Resolving Japan's Territorial and Maritime Disputes with China, Korea and the Russian Federation". USA.
- Schweller, R. (2018). Opposite but Compatible Nationalism: A Neoclassical Realist Approach to the Future of US-China Relations. *The Chinese Journal of International Politics*, 23-48.
- Semansky, Patrick. TASS. Washington Recognizes Japan's Sovereignty over Four Northern Islands in Southern Kurils-US Envoy. Retrieved from <https://tass.com/world/1399083>.
- Shendrikova, D. (2012). The Russo-Japanese War in Russian and Japanese Public Opinion and Historical Research. *Mediterranean Journal of Social Sciences Vol.3* (8), 54-59.
- Siyoto, D. S., & Sodik, M. A. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Sleman: Literasi Media Publishing.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Sosial Humaniora Jurnal*, Vol. 9, No. 2, 57-65.
- Sristhi, Jha. "Japan says Kuril Islands 'primordially Japanese, Russia's occupation against intl order". *Republic World Web Site*, 2022, diakses melalui <https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/japan-says-kuril-islands-primordially-japanese-russias-occupation-against-intl-order-articleshow.html> pada 4 April 2022.
- Sygyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Synder, J. (2004). One World, Rival Theories. *Foreign Policy* No. 145, 52-62.
- Taira, Koji. Japan, an Imminent Hegemon. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* Vol. 513, *Japan's External Economic Relations: Japanese Perspectives*, Sage Publications, 1991, Retrieved from https://www.jstor.org/stable/1047088#metadata_info_tab_contents, 151.
- Takashi, Tsukamoto. (2020). The Four Northern Islands and The San Francisco Peace Treaty. Retrieved from <https://www.spf.org/islandstudies/research/a00022r.html>.

- Takashi, Tsukamoto. (2022). Russia's Claim to Sovereignty over the Four Northern Islands. Retrieved from <https://www.spf.org/islandstudies/research/a00021r.html#anc6>.
- Tamaki, Nobuhiko. (2020). Japan's quest for a rules-based international order: The Japan-US alliance and the decline of liberal hegemony", Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13569775.2020.1777041>.
- TASS, "Talks with potential investors in offshore zone on Kuril Islands started, says ministry," diakses pada 2 Juli 2022, <https://tass.com/economy/1390527>
- Tokyo Review. "Putin's Invasion Is a Turning Point in Japan's Relations with Russia". Tokyo Review (28 Februari 2022) internet. 9 September 2022. <https://www.tokyoreview.net/2022/02/putins-invasion-is-a-turning-point-in-japans-relations-with-russia/>
- Tomoko, Kamata. "Japan-Russia peace treaty talks suspended". NHK World Japan (5 April 2022) internet. 8 September 2022. <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/1958/>
- Treaty for Exchange of Sakhalin for the Kurile Islands. (1875). Article 2 of Joint Compendium of Documents on the History of Territorial. Retrieved from <http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/edition92/period2.html>
- U.S.-Japan Relations. Congressional Research Service. (2022). Retrieved from <https://sgp.fas.org/crs/row/IF10199.pdf>.
- Valencia, Mark J and Ludwig, Noel. "Southern Kurile Islands / Northern Territories", *GeoJournal*. Vol. 24. No. 2 (2016) 227–231.
- Vassiliouk, Svetlana. "Contemporary Japanese- Russian Energy Cooperation: Problem, Current Development, and Perspectives, History of Bilateral Cooperation; Lesson and Problem from the Past". School of Global Japanese Studies (Meiji University, Tokyo, 2012) hal 3. Dikutip dari pada 10 September 2022. http://paperroom.ipsa.org/app/webroot/papers/paper_11465.pdf
- Vassiliouk, Svetlana. "Contemporary Japanese-Russian Energy Cooperation: Problems, Current Developments, and Perspectives". International Political Science Association (2008).
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2012). *International Relations Theory 5th Edition*. Boston: Pearson education Inc.
- VOA. Putin, Abe Discuss Kuril Island, WWII Treaty. Retrieved from <https://www.voanews.com/a/putin-abe-discuss-kuril-islands-wwii-treaty/4411351.html>.

- Waltz, K. N. (2012). *Explaining War: The Levels of Analysis*. In P. R. Viotti, & M. V. Kauppi, *International Relations Theory 5th Edition* (pp. 96-102). New York: Pearson .
- Wu, C. C.-H. (2012). Understanding the Structure and Contents of National Interest: An Analysis of Structural Equation Modeling. *Korean Journal of International Studies* Vol. 15, No. 3 , 391-420.
- Yohanes Putra Suhito. "Sengketa Wilayah Kepulauan Kuril Selatan dan Relevansinya terhadap Dinamika Hubungan Rusia Jepang". skripsi, Universitas Airlangga, 2016